

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peran masyarakat sebagai agen pembangunan (*development agent*) dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk indikator ataupun ukuran untuk menilai pelaksanaan program pembangunan. Pada penyusunan rencana program pembangunan terutama di tingkat daerah otonom, masyarakat masih merupakan sasaran utama dari setiap agenda pelaksanaan program pembangunan. Bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional. Bidang kesejahteraan sosial ini meliputi bidang pemerataan pendapatan, kelengkapan prasarana, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Bidang kesejahteraan sosial juga meliputi upaya untuk mendorong meningkatnya pendapatan melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas sumberdaya maupun faktor-faktor produksi lainnya. Masalah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun akses terhadap sumberdaya juga bagian yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial setelah masa pemberlakuan desentralisasi fiskal lebih banyak difokuskan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah daerah tertinggal baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah di Kawasan Barat Indonesia atau KBI (Laporan Bidang

Kesra Kementrian Kesra, 2004). Keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah dan belum membaiknya kinerja sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi di daerah tersebut menyebabkan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan sejumlah tuntutan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Adapun mengenai gambaran indikator beberapa bidang kesejahteraan untuk tingkat propinsi di KTI diperlihatkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Beberapa Indikator Bidang Kesejahteraan di Daerah Tingkat Propinsi**  
**di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2004**

No.	Propinsi	Jumlah Daerah Tertinggal <sup>1)</sup>	PDRB Per Kapita <sup>2)</sup> (ribu Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	Kalimantan Barat	13	5.721,23	13,91
2	Kalimantan Tengah	14	8.039,09	10,44
3	Kalimantan Selatan	9	7.934,44	7,19
4	Kalimantan Timur	12	38.647,91	11,57
5	Sulawesi Utara	8	6.288,31	8,94
6	Gorontalo	12	3.343,69	29,01
7	Sulawesi Tengah	10	4.921,89	21,69
8	Sulawesi Selatan	9	4.632,34	14,90
9	Sulawesi Tenggara	10	4.401,78	21,90
10	Nusa Tenggara Barat	19	4.023,78	25,36
11	Nusa Tenggara Timur	23	2.593,90	27,86
12	Maluku	16	3.421,03	32,13
13	Maluku Utara	12	2.934,66	12,42
14	Papua	28	11.921,88	38,69

Sumber: Laporan Bidang Kesra (Kementrian Kesra, 2004)

Keterangan:

- 1) Rata-rata untuk masing-masing daerah kabupaten
- 2) Berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Jumlah daerah tertinggal untuk masing-masing daerah kabupaten paling banyak ditemukan di Propinsi Papua, yaitu terdapat rata-rata sebanyak 28 daerah kecamatan per kabupaten (lihat Tabel 1.1). Rata-rata tingkat kemiskinan daerah kabupaten di Propinsi Papua ini juga ditunjukkan paling tinggi pada tahun 2004, yaitu mencapai 38,69%. Daerah tingkat propinsi di KTI yang memiliki jumlah daerah tertinggal terbesar kedua adalah Propinsi NTT dengan rata-rata jumlah daerah

tertinggal per kabupaten mencapai 23 daerah tertinggal. Rata-rata tingkat kemiskinan untuk masing-masing daerah kabupaten ditunjukkan lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan daerah kabupaten di Propinsi Papua, yaitu sebesar 27,86%. Namun, PDRB per kapita untuk Propinsi NTT ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Propinsi Papua, yaitu sebesar Rp 2.593,9 ribu.

Pelaksanaan program pembangunan di KTI ini lebih banyak difokuskan pada daerah-daerah yang relatif minim ketersediaan prasarana kesejahteraan seperti ketersediaan air bersih, sarana kesehatan/pengobatan, sarana pendidikan, dan sarana penyuluhan. Beberapa penyusunan perencanaan program lebih banyak terserap pada upaya untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial seperti masalah gizi buruk dan busung lapar, rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, minimnya pengetahuan mengenai hidup sehat, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja (Rakestra, 2007).

Persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada prinsipnya terletak pada orientasi pelaksanaan program pembangunan dan efektivitas dari realisasi proyek pembangunan tersebut (Kuncoro, 2005: 25). Untuk mengejar ketertinggalan daerah, pihak pemerintah daerah terutama di KTI lebih banyak berorientasi untuk mewujudkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi regional di daerahnya masing-masing. Program pembangunan lebih banyak diarahkan pelaksanaannya pada bidang fisik seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu syarat pokok untuk mendukung mobilisasi kapital di daerah. Keterbatasan keuangan daerah menyebabkan alokasi untuk pelaksanaan program-program di bidang kesejahteraan sosial menjadi berkurang karena lebih banyak terserap untuk

merealisasikan pembangunan di bidang fisik. Adapun distribusi rata-rata pengeluaran pembangunan pemerintah daerah tingkat kabupaten di KTI ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Rata-Rata Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah**  
**Tingkat Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2004**  
(%)

No.	Propinsi	Bidang Fisik	Bidang Kesejahteraan Sosial
1	Kalimantan Barat	70,6	29,4
2	Kalimantan Tengah	72,4	27,6
3	Kalimantan Selatan	69,4	30,6
4	Kalimantan Timur	71,8	28,2
5	Sulawesi Utara	69,1	30,9
6	Gorontalo	67,6	32,4
7	Sulawesi Tengah	72,4	27,6
8	Sulawesi Selatan	68,8	31,2
9	Sulawesi Tenggara	66,7	33,3
10	Nusa Tenggara Barat	71,2	28,8
11	Nusa Tenggara Timur	73,1	26,9
12	Maluku	69,2	30,8
13	Maluku Utara	70,6	29,4
14	Papua	65,5	34,5

Sumber: Statistik APBD Kabupaten/Kota (BPS, 2004).

Pada Tabel 1.2, keseluruhan daerah kabupaten/kota di KTI ditunjukkan lebih banyak mengalokasikan sumber pendanaan pembangunan untuk bidang fisik di mana sebagian besar dari pengeluaran bidang fisik tersebut lebih banyak direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur. Rata-rata distribusi pengeluaran bidang fisik terhadap total pengeluaran untuk program pembangunan ini mencapai di atas 60%. Bidang kesejahteraan sendiri hanya mendapatkan porsi kurang dari 35% untuk keseluruhan daerah kabupaten/kota di KTI. Daerah tingkat kabupaten/kota yang mengalokasikan dana pembangunan daerah untuk bidang kesejahteraan sosial yang paling tinggi terdapat di Propinsi Papua, yaitu mencapai 34,5% pada tahun anggaran

2004. Untuk daerah yang mengalokasikan paling sedikit pengeluaran untuk bidang kesejahteraan terdapat pada daerah kabupaten/kota di Propinsi NTT, yaitu rata-rata untuk kabupaten/kota mencapai 26,9%.

Di Propinsi NTT, alokasi untuk bidang kesejahteraan sosial lebih banyak digunakan untuk program-program penanggulangan masalah gizi buruk dan kesuliatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini dikarenakan kondisi sebagian besar wilayah di Propinsi NTT yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Transisi sektor pertanian di Propinsi NTT ini juga masih relatif lamban dibandingkan daerah-daerah lainnya di KTI. Kondisi seperti ini menyebabkan orientasi pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial lebih banyak difokuskan pada upaya penyelesaian masalah yang bersifat sementara. Besarnya alokasi dana yang dibutuhkan juga menyebabkan aspek pemberdayaan yang menjadi salah satu sasaran bidang kesejahteraan sosial ini cenderung berjalan kurang efektif. Beberapa sasaran pokok untuk mengoptimalkan pemberdayaan masih menjadi persoalan karena belum adanya dasar yang cukup memadai untuk menciptakan pola pemberdayaan sumberdaya secara berkelanjutan.

Permasalahan pokok dalam penerapan model pembangunan di daerah ini adalah kesesuaian antara model pembangunan yang direalisasikan dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perbedaan orientasi pelaksanaan model pembangunan dengan sasaran pokok yang diinginkan oleh pihak pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pihak pemerintah daerah tentunya menginginkan bahwa model pembangunan tersebut memiliki dampak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara nyata. Hal ini tentunya akan

menyebabkan alokasi untuk pembangunan fisik lebih banyak atau lebih diintensifkan ketimbang pemanfaatan dari pembangunan fisik tersebut. Gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Realisasi Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas**  
**Kesejahteraan di Propinsi NTT, 2001-2004**  
(%)

Program	2001	2002	2003	2004
<b>1. Pembangunan Fisik</b>				
a. Jalan raya dan Jembatan	12,2	11,4	13,0	12,4
b. Saluran irigasi/pengairan	14,7	11,6	12,7	11,6
c. Puskesmas	10,3	12,7	11,4	10,9
d. Bangunan sekolah	17,1	14,3	15,1	16,2
e. Bangunan pasar	9,2	8,9	10,1	9,8
f. Saluran air bersih	8,6	7,9	9,1	9,3
<b>2. Pembangunan Non-Fisik</b>				
a. Program wajib belajar	4,7	3,9	4,3	3,6
b. Program buta huruf	3,9	3,2	3,3	4,7
c. Penyuluhan kesehatan	2,8	3,1	2,9	3,1
d. Penyuluhan gizi	3,2	2,9	3,0	3,3
e. Pemberian makanan sehat	1,9	1,7	2,1	2,0
f. Pengendalian hidup sehat	2,1	1,9	2,2	2,1
g. Penyuluhan usaha	4,4	4,2	4,1	4,4
h. Permodalan usaha	4,8	4,7	4,6	4,2
i. Bantuan pangan	3,8	4,1	3,9	4,3

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sosial (Propinsi NTT, 2004)

Pada Tabel 1.3 di atas, perkembangan untuk pembangunan fisik yang dialokasikan ke seluruh daerah tingkat kabupaten dan kota di Propinsi NTT terlihat lebih tinggi dibandingkan pembangunan di bidang non-fisik. Rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya untuk tiap rencana program pembangunan fisik ditunjukkan senantiasa di atas 5% dari tahun 2001 hingga 2004. Untuk bidang pembangunan non-fisik, pertumbuhan tiap tahunnya dari tahun 2001 hingga 2004 ditunjukkan kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perencanaan strategis pembangunan untuk

kawasan di Propinsi NTT ini masih berorientasi pada pembangunan fisik. Model pembangunan ini selain dapat ditujukan sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan, juga dapat dimaksudkan untuk penambahan keperluan pembelian modal yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional. Pembelian modal pada prinsipnya akan menggerakkan pertumbuhan nilai tambah dari penggunaan sumberdaya yang kemudian akan berdampak pada peningkatan output di daerah. Mengenai alokasi untuk pembangunan non-fisik ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Alokasi Realisasi Anggaran Untuk Program di Bidang Kesejahteraan Sosial**  
**Daerah Tingkat Kabupaten di Propinsi NTT Tahun 2004**  
 (%)

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Hidup	Pengobatan Massal	Pembinaan dan Penyuluhan
Kab. Sumba Barat	31,6	37,6	30,8
Kab. Sumba Timur	32,4	38,1	29,5
Kab. Kupang	33,8	32,1	34,1
Kab. Timor Tengah Selatan	34,7	31,4	33,9
Kab. Timor Tengah Utara	29,1	33,7	37,2
Kab. Belu	30,4	29,6	40,0
Kab. Alor	32,3	29,7	38,0
Kab. Lembata	34,1	30,4	35,5
Kab. Flores Timur	32,2	33,4	34,4
Kab. Sikka	37,8	39,6	22,6
Kab. Ende	34,6	36,4	29,0
Kab. Ngada	35,4	34,7	29,9
Kab. Manggarai	32,4	35,1	32,5
Kab. Rote Ndao	30,6	36,4	33,0
Kab. Manggarai Barat	33,7	32,7	33,6
Kota Kupang	27,6	30,4	42,0

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sosial (Propinsi NTT, 2004)

Pada Tabel 1.4 diperlihatkan bahwa rata-rata alokasi untuk program di bidang pemenuhan kebutuhan hidup maupun bidang pengobatan massal mencapai di atas 30%. Penyerapan yang begitu tinggi untuk kedua bidang tersebut dikarenakan

banyaknya persoalan yang saat itu mendesak untuk segera dilakukan penyelesaiannya. Sementara itu, untuk bidang pemberdayaan yang meliputi program pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan bidang penyuluhan pertanian relatif mendapatkan porsi yang termasuk kurang memadai. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.3, hanya terdapat dua daerah yang memiliki porsi di atas 40%, yaitu Kabupaten Belu dan Kota Kupang. Untuk daerah yang paling sedikit mengalokasikan program pemberdayaan ini terdapat pada Kabupaten Sikka, yaitu hanya sebesar 22,6% dari total keseluruhan pendanaan untuk bidang kesejahteraan sosial.

Wilayah tingkat kabupaten yang termasuk perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan daerah tertinggal di Propinsi NTT ini adalah Kabupaten Sikka. Permasalahan sentral pembangunan di Kabupaten Sikka ini terletak pada ketertinggalan terhadap sarana kesejahteraan seperti ketersediaan jalan, listrik, air bersih, dan adanya permasalahan abrasi pantai. Hal ini terutama paling banyak ditemukan di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT. Seperti halnya wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Sikka, isu pembangunan masih difokuskan untuk menyediakan sarana maupun prasarana kesejahteraan sosial. Perancangan program pembangunan di Kabupaten Sikka yang juga diselaraskan dengan program pemercepat pembangunan daerah tertinggal diorientasikan untuk menyediakan minimnya sarana maupun prasarana di setiap wilayah tingkat kecamatan terutama di Kecamatan Bola. Hasil atau realisasi model pembangunan seperti ini diharapkan dapat selaras dengan harapan masyarakat terhadap model pembangunan tersebut. Adapun gambaran untuk model pembangunan yang telah berjalan di Kabupaten

pengolahan air bersih. Secara umum, realisasi model pembangunan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.5 di atas diharapkan akan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Indikasi untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat terhadap model pembangunan dapat diketahui dengan melihat data kesejahteraan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.6 berikut ini.

**Tabel 1.6**  
**Beberapa Indikator Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan**  
**di Kabupaten Sikka, Propinsi NTT Tahun 2005**

No.	Kecamatan	Kepadatan (Jiwa/Km)	Tingkat Kemiskinan (%)	Kasus Gizi Buruk (Per tahun)
1	Paga	158	34,67	74
2	Mogo	119	34,70	89
3	Lela	364	34,89	92
4	Bola	174	47,19	119
5	Talibura	64	34,49	81
6	Waigate	88	34,15	96
7	Kewapante	464	34,17	88
8	Maumere	199	35,22	73
9	Palue	250	34,01	68
10	Nita	158	34,18	91
11	Megapanda	151	35,77	108
12	Alok	767	36,31	78

Sumber: Statistik Sosial Kabupaten di Propinsi NTT (BPS Propinsi NTT, 2005)

Indikator kesejahteraan sosial yang akan digunakan untuk mengkomparasikan hasil-hasil pembangunan yang telah berjalan di Kabupaten Sikka hingga tahun 2005 ini adalah tingkat kemiskinan dan banyaknya kasus gizi buruk di tingkat kecamatan. Tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Sikka terdapat di Kecamatan Bola, yaitu mencapai 47,19%. Rata-rata tingkat kemiskinan untuk tingkat kecamatan ini ditunjukkan di atas 30% atau masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Propinsi NTT sebesar 29,96% pada tahun 2005. Kasus gizi buruk yang sering ditemukan di daerah ini juga masih di atas rata-rata kasus gizi buruk yang dilaporkan secara nasional, yaitu

sebesar 68 kasus per tahun. Dari kedua indikator kesejahteraan ini diperlihatkan bahwa orientasi pelaksanaan model pembangunan yang selama ini dijalankan di Kabupaten Sikka, Propinsi NTT tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap model pembangunan.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, untuk mengetahui model pembangunan yang diinginkan ataupun dibutuhkan masyarakat perlu dilakukan penelusuran terhadap penilaian masyarakat berdasarkan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Seperti kita ketahui bahwa sasaran pokok dari setiap penyusunan maupun pelaksanaan model pembangunan itu adalah masyarakat. Ini berarti untuk mengetahui kesesuaian antara hasil yang telah dilaksanakan dari model pembangunan dan kebutuhan masyarakat akan hasil pembangunan tersebut, pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow dianggap cukup relevan. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut lebih memperhatikan penilaian sasaran fundamental dari model pembangunan terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelaksanaan model pembangunan tersebut (Sukmara dan Crawford, 2002: 3-4) Dalam hal ini, penelitian ini juga akan mencari tahu tentang model pembangunan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT.

## **1.2. Rumusan Masalah**

. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah Bagaimanan model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

### 1.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmara dan Crawford (2002) menganalisis mengenai persepsi masyarakat yang diimplementasikan sebagai perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial di Desa Talise yang menjadi salah satu sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini dijelaskan pada peran sentral masyarakat terhadap pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial yang tidak hanya berperan sebagai obyek yang menerima sasaran program, akan tetapi juga berperan sebagai indikator kontrol (*controlling*). Peran masyarakat ini kemudian dijelaskan sebagai persepsi atau penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial yang sekaligus menjadi indikator kualitatif untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menerapkan metode survei untuk sejumlah populasi yang terdapat di Desa Talise. Responden dipilih dengan metode *simple random sampling* dengan jumlah mencapai 112 kepala keluarga yang terdiri atas pria dan wanita. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan metode wawancara untuk mendapatkan informasi akurat dari 38 pertanyaan yang diajukan. Alat analisis yang digunakan adalah metode *one sample t-test* dan *independent sample t-test* untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok pria dan wanita dan untuk mengukur besarnya penilaian responden terhadap program peningkatan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menemukan bahwa hasil kumulatif dari kegiatan proyek dan capaian yang diraih menunjukkan bahwa kemajuan yang signifikan telah dibuat pada

pembuatan suatu model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis-masyarakat di Desa Talise. Terdapat tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan proyek. Pengetahuan yang rendah mengenai tujuan dan peraturan-peraturan daerah perlindungan laut dan perbedaan yang nyata antara pria dan wanita mungkin karena daerah perlindungan laut masih dalam proses pembuatan. Perubahan spesifik dalam kualitas hidup yang disebabkan karena adanya kegiatan proyek terlihat, seperti peningkatan harapan mengenai masa depan, terjaminnya hak kepemilikan tanah, pengurangan banjir, peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya ukuran keyakinan terhadap sumberdaya-kemanjuran, deklarasi Talise dan pembuatan daerah perlindungan laut.

Penelitian yang dilakukan oleh Malvicini dan Sweetser (2003) menganalisis secara deskriptif mengenai cara-cara partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Teknis Regional (RETA) yang dikoordinasikan melalui *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2000 dan 2001 di sejumlah daerah di Indonesia. Konsep atau kerangka berpikir didasarkan pada permasalahan pembangunan berkelanjutan dan peran atau partisipasi dari masyarakat yang ditempatkan sebagai *agent of change* di sejumlah negara-negara sedang berkembang pada milenium ketiga ini. Sebagai agen perubahan ini, partisipasi masyarakat diharapkan dapat menghasilkan suatu bentuk konsep atau model pembangunan yang dibutuhkan ataupun diinginkan oleh masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dilakukan dengan cara *cluster sampling* di beberapa titik lokasi penyebaran sampel yang

dianggap sebagai pusat aktivitas keseharian masyarakat. Metode *sampling* seperti ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin perihal partisipasi masyarakat dalam merespon program-program pembangunan yang selama ini telah dijalankan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya setelah mendapatkan sampel yang diinginkan akan dilakukan penyebaran pertanyaan baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat akan diarahkan pula pada model-model pembangunan yang belum pernah diterapkan di mana sebelumnya telah diujicobakan di negara-negara berkembang lainnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa sasaran terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masih menjadi tujuan utama yang diharapkan ataupun diinginkan oleh masyarakat terhadap model pembangunan yang selama ini dijalankan di daerahnya masing-masing. Dari hasil survei lapangan di beberapa daerah, sebagian besar lebih menginginkan bentuk pembangunan yang secara langsung atau nyata dapat memberikan dampak terhadap upaya masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pada beberapa daerah juga ditemukan bahwa bentuk pembangunan sarana dan prasarana dianggap lebih diutamakan karena dianggap sebagai kebutuhan yang mendasar seperti pembangunan jaringan irigasi, air minum, dan instalasi jaringan listrik. Perbedaan bentuk pembangunan yang diinginkan di antara daerah dapat terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dasar atau orientasi dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.